

**ANALISIS PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI
BAPPEDA KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

**SYARIF HIDAYATULLAH
NIM. 07011282025070**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
MARET 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) DI BAPPEDA KABUPATEN OGAN
ILIR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

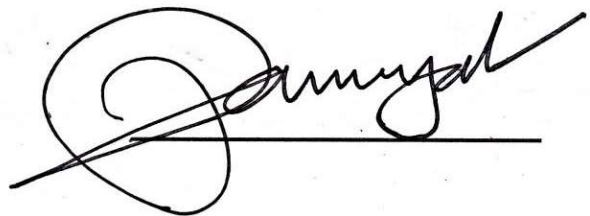
SYARIF HIDAYATULLAH

NIM. 070112802025070

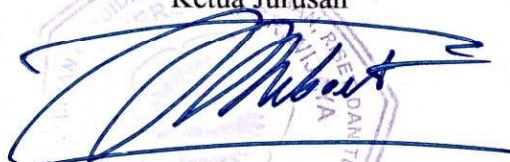
Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Maret 2024

Pembimbing

Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI APLIKASI
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI
BAPPEDA KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

Oleh :
SYARIF HIDAYATULLAH
NIM. 07011282025070

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 25 Maret 2024**

Pembimbing:

Januar Eko Arvansah S.IP., S.H., M.Si
NIP. 198801272019031005

Penguji:

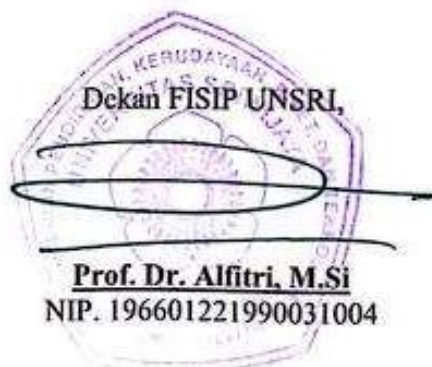
Dr. Andries Lionardo S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121000

Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tak selamanya langit itu kelam

Suatu saat akan cerah juga

Hiduplah dengan sejuta harapan

Habis gelap akan terbit terang”

(Syarif Hidayatullah)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- 1. Diri sendiri**
- 2. Kedua orang tua terkasih**
- 3. Keluarga besarku**
- 4. Seluruh dosen dan pegawai FISIP
UNSRI**
- 5. Teman-teman jurusan Administrasi
Publik Angkatan 2020**
- 6. Almamater kuning kebanggaan,
Universitas Sriwijaya**

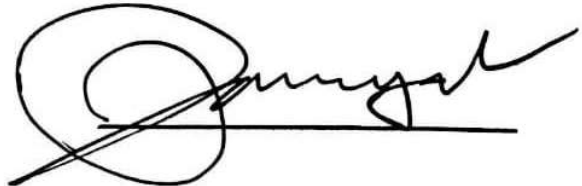
ABSTRAK

E-Government merupakan upaya dalam meningkatkan akses dan penyampaian informasi layanan pemerintah secara efisien dengan penggunaan teknologi, khususnya aplikasi berbasis *web*. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang memiliki kemampuan untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan dan mengelola data pembangunan daerah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengawasan kinerja pemerintah daerah. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan *E-Government* dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir. Teori yang digunakan adalah teori *E-Government* yang diungkapkan oleh Indrajit yaitu *Content Development, Competency Building, Cyber Laws, Connectivity, Citizen Interfaces, dan Capital*. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-Government* dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir belum cukup baik, karena dimensi yang terpenuhi hanya *Cyber Laws, Citizen Interfaces* dan *Capital*.

Kata Kunci: E-Government, Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembimbing

Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005



Indralaya, Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

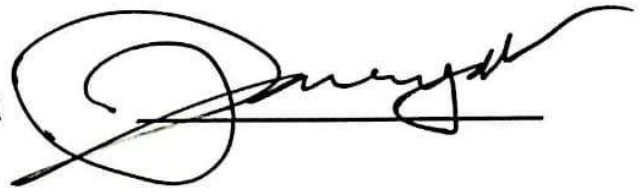
ABSTRACT

E-Government is an effort to improve access and delivery of government service information efficiently with the use of technology, especially web-based applications. The Local Government Information System (SIPD) is a system that has the ability to document, administer and manage regional development data into information that can be used as a reference for decision making in the context of planning, implementing, evaluating and monitoring local government performance. The purpose of this research is to find out how the application of E-Government in regional development planning through the Regional Government Information System (SIPD) at Bappeda Ogan Ilir Regency. The theory used is the E-Government theory expressed by Indrajit, namely Content Development, Competency Building, Cyber Laws, Connectivity, Citizen Interfaces , and Capital. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. The data collection techniques used are data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing or verification. The analysis technique performed. The results showed that the application of E-Government in regional development planning through the Regional Government Information System (SIPD) at Bappeda Ogan Ilir Regency was not good enough, because the dimensions met were only Cyber Laws, Citizen Interfaces and Capital.

Key Words: E-Government, Regional Development Planning

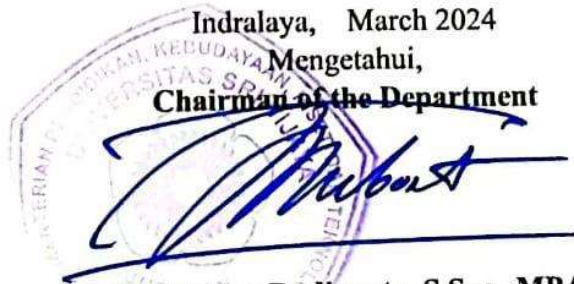
Advisor,

Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005



Indralaya, March 2024

Mengetahui,
Chairman of the Department



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarif Hidayatullah

NIM : 07011282025070

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan *E-Government* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Kabupaten Ogan Ilir” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang, Maret 2024



Syarif Hidayatullah

NIM. 07011282025070

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis masih diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan *E-Government* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir” dengan tepat waktu.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan kelulusan pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam melaksanakan penelitian ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. ALLAH SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penelitian hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai Utusan Allah yang telah memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan.
3. Kedua orang tua sebagai orang yang tidak pernah letih memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan serta mendoakan anaknya agar bisa sukses di dunia dan akhirat.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
7. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
8. Mbak Ita Permata Sari, selaku Admin Jurusan Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang senantiasa membantu dalam proses administrasi selama masa perkuliahan.
9. Mbak Rafflesia Adesty, selaku Admin Jurusan Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang yang senantiasa membantu dalam proses administrasi selama masa penyusunan skripsi.
10. Para Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu, wawasan, pengalaman, bantuan, serta arahan kepada penulisan selama masa perkuliahan.

11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melaksanakan proses perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman di jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data untuk kelengkapan penelitian ini.
14. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah bersedia membantu, dan menceritakan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, apabila masih terdapat kekeliruan dalam penulisan, penulis menerima kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kesalahan laporan ini kedepannya. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama.

Palembang, 8 Maret 2024
Penulis,

Syarif Hidayatullah
NIM. 07011282025070

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori	10
B. <i>E-Government</i>	10
1. Pengertian <i>Electronic Government</i>	10
2. Prinsip-Prinsip <i>E-Government</i>	11
3. Macam-Macam Relasi Pada <i>E-Government</i>	12
4. Manfaat <i>E-Government</i>	14
5. Hambatan Penerapan <i>E-Government</i>	15
1. Indikator Penerapan <i>E-Government</i>	16
C. Perencanaan Pembangunan Daerah	18
1. Pengertian Perencanaan	18
2. Pengertian Pembangunan.....	19
3. Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah.....	19
D. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.....	21
E. Penelitian Terdahulu	24

F. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Variabel Penelitian.....	33
1. Definisi Konseptual.....	33
2. Fokus Penelitian.....	34
C. Unit Analisis Data	35
D. Sumber Data	35
E. Penentuan Informan	37
1. Wawancara	39
2. Dokumentasi	39
3. Observasi.....	40
4. Teknik Analisis Data	41
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	43
BAB IV	44
4.1 Lokasi Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
4.1.2 Visi & Misi Kabupaten Ogan Ilir	45
4.1.3 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Ogan Ilir	45
4.1.4 Deskripsi Informan Penelitian	53
4.2 Hasil Penelitian	53
4.2.1 <i>Content Development</i>	54
4.2.2 <i>Competency Building</i>	59
4.2.3 <i>Cyber Laws</i>	68
4.2.4 <i>Connectivity</i>	73
4.2.5 <i>Citizen Interfaces</i>	76
4.2.6 <i>Capital</i>	78
BAB V.....	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan SIPD	4
Gambar 2 Alur Perencanaan di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir.....	5
Gambar 3 Kerangka Berpikir	31
Gambar 4 Teknik Analisis Data	43
Gambar 5 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Ogan Ilir	52
Gambar 6 Tampilan laman awal SIPD.....	54
Gambar 7 Tampilan laman Website Laporan Pengaduan SIPD.....	56
Gambar 8 Interview bersama Pimpinan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Ilir	61
Gambar 9 Sosialisasi dan Pendampingan Pengisian SIPD Seluruh OPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023	66
Gambar 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.....	69
Gambar 11 Interview Peneliti Bersama Operator SIPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Ilir.....	71
Gambar 12 Dokumentasi Penggunaan Fasilitas Jaringan dan Perangkat Keras Bappeda Kabupaten Ogan Ilir	74
Gambar 13 Interview Peneliti Bersama Kabid PPE Bappeda Kabupaten Ogan Ilir	75
Gambar 14 Tampilan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)	78
Gambar 15 Interview Peneliti bersama Informan.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kelompok Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	22
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3 Fokus Penelitian	34
Tabel 4 Informan Peneliti	38
Tabel 5 Data Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Ilir	63
Tabel 6 Data Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika	64
Tabel 7 Matriks Temuan Hasil Penelitian	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	92
Lampiran 2 Dokumentasi.....	96
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian	97
Lampiran 4 Permendagri No.70 Tahun 2019	100
Lampiran 5 Cek Turnitin	117
Lampiran 6 Surat Pernyataan Similarity	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan dalam teknologi dan informasi yang semakin cepat mendorong pemerintah untuk menggalakkan inovasi yang dapat memberikan manfaat luas bagi sistem pemerintahan dan masyarakat. Untuk melayani dengan berkomunikasi dengan masyarakat lewat teknologi internet dan digital, pemerintahan berbasis elektronik berpatokan dengan dengan kemampuan lembaga pemerintah. Perkembangan teknologi informasi ini memiliki dampak positif dan bermanfaat bagi beberapa pihak, contohnya pemerintah, organisasi internasional, bisnis, dan masyarakat umum. Pemerintahan berbasis elektronik berkonsep dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintah serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat..

Manfaat teknologi informasi menurut pemerintahan yang sudah dijelaskan di atas, Penjelasan mengenai manfaat teknologi informasi bagi pemerintahan, yang telah diuraikan di atas, sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong koordinasi di antara pelaku pembangunan, memastikan terwujudnya sinkronisasi, integrasi, dan sinergi dari tingkat daerah hingga tingkat pusat, serta menjamin konsistensi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Selain itu, undang-undang pun memiliki tujuan dalam memaksimalkan keikutsertaan masyarakat serta kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia yang adil dan berkepanjangan. Teknologi informasi ini digunakan dalam sistem pemerintahan Indonesia dimulai dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor

3 Tahun 2023 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Indonesia. Hal ini tentang cara memanfaatkan teknologi komunikasi informasi dalam mencapai kemampuan, keefisienan, dan transparansi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. (Azmi Fadila dkk., 2021).

Banyak ahli mengemukakan terkait definisi dari *Electronic Government* atau yang bisa disebut *E-Government*. Menurut Brown and Brudney (Putrina Ega, 2023) *Electronic Government* merupakan upaya dalam meningkatkan akses dan penyampaian informasi layanan pemerintah secara efisien dengan penggunaan teknologi, khususnya aplikasi berbasis web. Selaras dengan Ronaghan (Putrina Ega, 2023) yang menyebutkan bahwa *Electronic Government* merupakan upaya dalam pemanfaatan teknologi oleh lembaga pemerintahan guna membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, dunia usaha, atau instansi pemerintahan lainnya dengan memanfaatkan *Wide Area Network* (WAN), *mobile computing*, ataupun internet (Wayan Budiani, 2009).

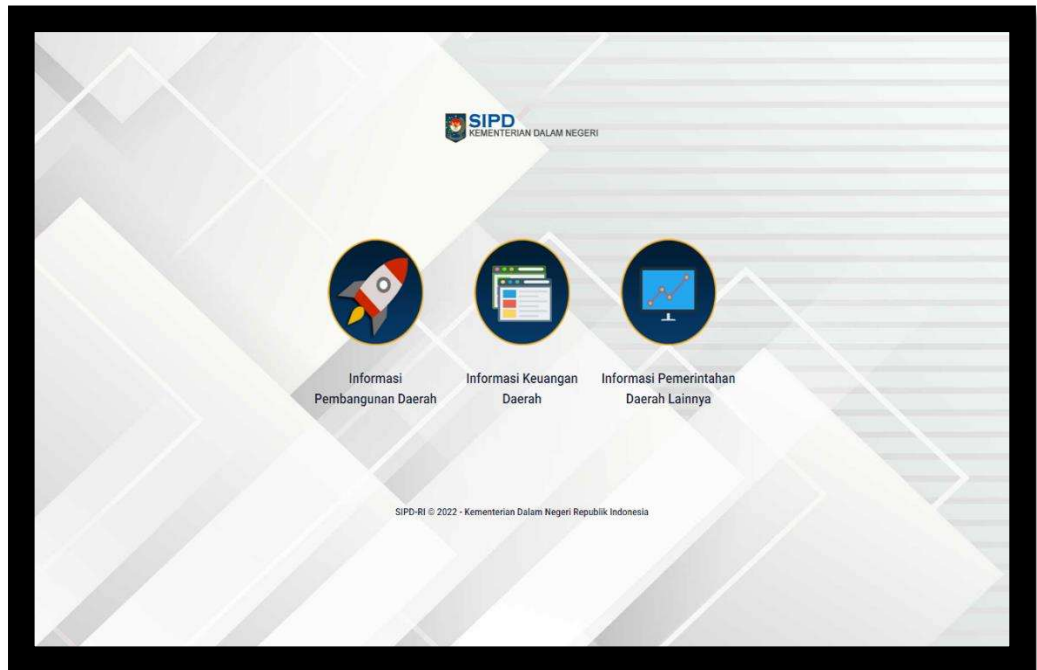
E-Government diterapkan di Indonesia berasaskan oleh dua macam alasan utama. Pertama, ada permintaan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan yang mudah diakses secara interaktif. Kedua, ada keinginan dari masyarakat untuk memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Maka dari itu, pemerintah diharapkan memberi suatu ruang bagi partisipasi dan dialog publik dalam pembuatan kebijakan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mewujudkan tujuan ini adalah melalui penerapan *E-Government* (Nuravita, 2017). Tujuan utama dari *E-Government* adalah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada rakyat. Ini berarti rakyat dapat mengakses layanan secara online dengan mudah, mendapatkan

informasi dengan cepat, dan dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan atau kritik kepada pemerintah. (Inzany dkk., 2022).

E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi digital oleh lembaga pemerintah untuk memfasilitasi komunikasi antara lembaga pemerintah, masyarakat umum, komunitas bisnis, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka memberikan layanan yang tepat waktu dan akurat. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, khususnya layanan informasi, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2003. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong *e-government* (Putra Salain & Jovan Wedana, 2023). Di sisi lain, tujuan dari *e-government* adalah untuk memperkuat jaringan komunikasi sektor publik-swasta dan pemerintah lainnya untuk memfasilitasi interaksi, transaksi, dan layanan. Sebagai sebuah konsep pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, *e-government* dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan : 1). Persiapan; 2). Kematangan; 3). Stabilitas; 4). Penggunaan. Aplikasi sistem *e-government* yang diharapkan dapat mentransformasi sistem pemerintahan yang ada menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Sobandi dkk., 2023).

Dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pemerintah mulai menerapkan teknologi informasi pada tahun 2019. Sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam Permendagri Nomor 70 untuk tahun anggaran 2019, SIPD telah berhasil menyempurnakan proses seleksi agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Karundeng dkk., 2021).

Gambar 1 Tampilan SIPD



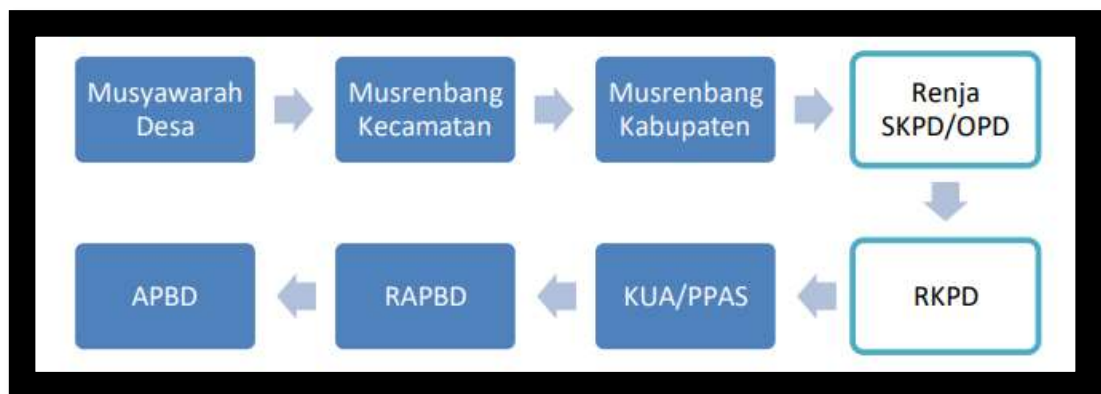
(Sumber: sipd.kemendagri.go.id)

Untuk memulai proyek perencanaan, setiap daerah otonom membuat lembaga teknis yang dikenal sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang dipimpin oleh seorang kepala dibawah gubernur, kantor gubernur, walikota, bupati melalui Sekretariat Daerah. Bappeda mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengoordinasikan proyek-proyek pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Ekaputra, 2021). Oleh karena itu sudah tentu disetiap daerah memiliki lembaga yang bertugas menyelenggarakan urusan perencanaan salah satunya adalah Kabupaten Ogan Ilir. Bappeda Kabupaten Ogan Ilir memiliki tugas yang sama dengan Bappeda di daerah lainnya yaitu untuk menjalankan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan yang dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir berlandaskan kepada empat aspek meliputi usulan politik (terdiri dari visi misi dari Bupati serta pokok pikiran/reses DPRD), teknokratis (berasal dari usulan OPD yang juga mengacu pada Renstra 5 tahun), partisipatif (

usulan-usulan yang didapatkan mulai dari musyawarah desa, musrenbang kecamatan hingga kabupaten), serta *top down* and *bottom up* (berupa usulan dari pemerintah pusat) (Vitriana & Ahyaruddin, 2022).

Usulan-usulan tersebut kemudian dihimpun dalam bentuk rencana kerja OPD, kemudian tahapan berikutnya OPPD melakukan input rencana dan program kerja di aplikasi SIPD kemudian seluruh rencana kerja (Renja) dan program dari OPD dijadikan satu dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setelah input RKPD selesai dilakukan, Bappeda bersama dengan DPRD menentukan RAPBD hingga pada tahapan akhir yaitu penetapan APBD yang dilakukan oleh BPKAD. Secara sederhana jika digambarkan, alur perencanaan di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:

Gambar 2 Alur Perencanaan di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir



Sumber: Bidang PPE Bappeda Ogan Ilir

Sebagai upaya dalam mendorong kualitas perencanaan, setiap pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir dituntut untuk mampu menerapkan dan mengembangkan suatu sistem informasi pembangunan dalam proses perencanaan di daerahnya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 30 ayat (1) tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa, “Setiap daerah diharuskan membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal (274) tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah , setiap daerah harus mengacu pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Tujuan dikeluarkannya SIPD yaitu agar kegiatan perencanaan pembangunan daerah dapat dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel dan partisipatif. Selain itu juga sebagai upaya menserasikan pengelolaan sistem informasi pemerintahan secara nasional, menghasilkan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik.

Pada tahun 2021, Seluruh K/L/B ataupun OPD di Indonesia wajib menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diluncurkan oleh Kemendagri kepada semua instansi pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan hingga pelaporan program kerja di instansi atau daerahnya. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang peneliti lakukan, ditemukan permasalahan terkait kurang lengkapnya data-data pembangunan yang berguna untuk perencanaan, serta rendahnya keterisian data pada *e-database* SIPD selama proses penyusunan dokumen rencana kerja untuk pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada saat pra riset, rendahnya keterisian data pembangunan disebabkan karena minimnya *timeline* atau tenggat waktu pengisian yang ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Ogan Ilir, minimnya kuantitas pegawai di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir yang bertugas menjadi operator untuk mengawasi proses pengisian SIPD oleh 47

OPD, kurangnya komunikasi, manajemen dan tanggung jawab pada setiap OPD terkait tugas input data pembangunan di aplikasi SIPD menjadi penghambat dalam menjalankan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Akibatnya, keterlambatan pengisian data perencanaan pembangunan menyebabkan *timeline* proses penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir terlambat dari *timeline* yang sudah ditentukan. Hal tersebut menyebabkan Bappeda Kabupaten Ogan Ilir selaku OPD yang berwenang dalam pendampingan dan pengawasan pengisian data rencana kerja dan pembangunan mendapatkan catatan khusus dari DPRD Kabupaten Ogan Ilir akibat dari molornya *timeline* pengisian data di SIPD.

Berdasarkan penelitian terdahulu hal serupa turut terjadi di instansi lain seperti didalam penelitian (Balqis & Fadhly, 2021) dengan judul penelitian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa sejak SIPD diluncurkan belum ada sosialisasi dan Bimtek terhadap pegawai OPD yang mengoperasikan SIPD. Dimana Distranaker Kabupaten Aceh Barat mengungkapkan kesiapan mereka dalam menjalankan SIPD hanya 60%. Akibatnya Distranaker Kabupaten Aceh Barat sering mengalami kendala dalam mengoperasikannya mulai dari kesalahan penginputan, hingga keterlambatan dalam proses penyusunan anggaran.

Terdapat berbagai manfaat yang bisa dirasakan apabila SIPD dapat diterapkan dengan baik yaitu bisa membuat penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menjadi lebih efektif dan tepat waktu, karena terdapat batasan waktu yang harus diperhatikan dari setiap rangkaian proses perencanaan, kemudian mampu meningkatkan kualitas perencanaan, karena di dalam aplikasi SIPD

menyediakan data pembangunan daerah yang berguna untuk kegiatan perencanaan, terciptanya rumah *legal database* pembangunan bagi seluruh daerah yang berguna sebagai bahan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah. lalu dalam hal pengumpulan data dari OPD menjadi lebih efektif dan efisien sehingga bisa menghemat waktu serta anggaran (Chandra Pramana dkk., 2023).

Keterisian data dalam laman aplikasi SIPD juga belum sepenuhnya menjadi perhatian khusus dari OPD, sehingga dalam proses pengumpulan data untuk kegiatan perencanaan di Bappeda terkadang masih dilakukan secara manual dengan melakukan koordinasi dan kunjungan langsung ke OPD yang terkait. Meskipun demikian, Bappeda tetap berusaha untuk memaksimalkan tugasnya dalam proses perencanaanya hingga saat ini yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan *E-Government* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Aplikasi SIPD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah “Bagaimanakah penerapan *E-Government* dalam perencanaan dan pembangunan daerah melalui aplikasi SIPD di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *E-Government* dalam perencanaan dan pembangunan daerah melalui aplikasi SIPD di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis,

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual mengenai pelaksanaan SIPD yang berorientasi kepada perkembangan teknologi informasi dalam ranah organisasi pemerintah dan diharapkan mampu menjadi sumbangan penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama terkait dengan *electronic government*.

2) Secara Praktis,

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada kegiatan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian ini juga diharapkan untuk membantu mengatasi permasalahan terkhusus dalam aplikasi SIPD ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N., Subarno, A., & Akbarini, N. R. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 7(2), 171–178.
<https://doi.org/10.20961/jikap.v7i2.62402>
- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Volume 6 Nomor 1*, 4036–4043.
- Alhanatleh, H., Aboalghanam, K., & Awad, H. (2022). Electronic government public value of public institutions in Jordan. *International Journal of Data and Network Science*, 6(1), 27–36.
<https://doi.org/10.5267/J.IJDNS.2021.10.007>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT RINEKA CIPTA.
- Atmoko, T. (2012). *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Azmi Fadila, O., Mahrizal, & Khalijah, S. (2021). Efektivitas Peran Bappeda Dalam Pembangunan Kota Medan. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 7(2), 133–144.
- B, W., Jr, W., & Davis, K. (1989). *Human Resource and Personnel Management*.
- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 117.
<https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.4246>
- Chandra Pramana, A., Yap, N., Rukmini, M., Mahmudi, S., & Agustina, E. (2023). Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. *Ekonomi Bisnis, Vol. 9 No. 1*.
- Deseverians, R., & Wulandari, S. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, XII(1)*, 13–30.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi, Vol.21 Nomor 1*.
- Indrajit, R. E. (2005). *Electronic Government In Action* (2 ed.). Preinexus.
- Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, Purwantoro, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan

Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No.10, 3573–3588.

- Karundeng, B. A., Kaawoan, E. , J., & Pangemanan, E. , S. (2021). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. Vol. 1, No. 2.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon, Ed.; 3 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moloeng, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nuravita, W. (2017). *Penerapan E-Planning Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Kegiatan Pebangunan Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar)*.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (M. Sandra, Ed.).
- Putra Salain, P. P., & Jovan Wedana, I. K. (2023). Penerapan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2(1).
- Putrina Ega. (2023). *Analisis Penerapan E-Government Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Studi Pada Bappeda Kabupatenpringsewu)*.
- Rianto Adi. (2010). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.
- Sari, D. N. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Bappeda Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(4), 242–248. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i4.373>
- Sobandi, A., Sopyan Febrianto, A., & Susita Herdiant, D. (2023). *Studi Literatur Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah*. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v22i1>
- Sudrajat, R. K., Setyowati, E., & Sukanto. (2015). Efektivitas Penyelenggaraan E-Government Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. *Administrasi Publik*, 3(12), 2145–2151.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. ALFABETA, .

- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan* (7 ed.). Remaja Rosdakarya.
- Tumija, Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Media Birokrasi*, 5, 79–91.
<https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389>
- Uddin, N., & Ud Doullah, S. (2021). Electronic Government for Trust Building. *Public Administration*, 1–10. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71066-2_119-1
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Vitriana, N., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). *DIGIBIS : Digital Business Journal*, 1(1). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis64>
- Wayan Budiani, N. (2009). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49–47.
- Zaman, B., & Nurdiwaty, B. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi*, 5(1), 63–84.